



Pengaruh SPI, SAKD, SAP dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga

Nur Aliya Widodo^{1*}, Anastasia Anggarkusma Arofah², Destin Alfianika Maharani³

¹⁻³Universitas Perwira Purbalingga, Indonesia

Alamat: Jl. Letjen S Parman No.53, Kedung Menjangan, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Korespondensi penulis : nuraliyawidodo@gmail.com

Abstract. *This study aims to empirically examine the influence of the Internal Control System (SPI), Regional Financial Accounting System (SAKD), Government Accounting Standards (SAP), and Transparency on the quality of financial statements in the Regional Government of Purbalingga Regency. The problem of the quality of financial statements is still an important issue in regional financial management, because quality financial reports not only function as a form of accountability to the public, but also as a basis for strategic decision-making for local governments. The research method uses a quantitative approach with questionnaire instruments distributed to 61 respondents, consisting of local government officials involved in the process of preparing financial statements and have met the research criteria. Data analysis was carried out using the inner model and outer model approaches, which resulted in an R-square value of 0.743 for the financial report quality variable. This value shows that the independent variables in this study were able to explain 74.3% of the variation in the quality of financial statements, while the rest was influenced by other factors outside the research model. The results of the analysis show that the SAKD and Transparency variables have a significant influence on the quality of local government financial statements. This confirms that a good financial accounting system and transparency in public budget management are the main factors that can improve the reliability, relevance, and accountability of financial statements. On the other hand, the SPI and SAP variables did not have a significant effect, which shows that the implementation of both still needs evaluation and improvement in order to make a real contribution to the quality of financial statements.*

Keywords: *Financial Report Quality, Regional Financial Accounting, SAP, SPI, Transparency*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan masih menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis bagi pemerintah daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen kuesioner yang disebarakan kepada 61 responden, terdiri dari aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan dan telah memenuhi kriteria penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan inner model dan outer model, yang menghasilkan nilai R-square sebesar 0,743 untuk variabel kualitas laporan keuangan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan 74,3% variasi kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel SAKD dan Transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menegaskan bahwa sistem akuntansi keuangan yang baik dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik merupakan faktor utama yang dapat meningkatkan keandalan, relevansi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Sebaliknya, variabel SPI dan SAP tidak berpengaruh signifikan, yang menunjukkan bahwa implementasi keduanya masih perlu evaluasi dan perbaikan agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas laporan keuangan. Implikasi penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan penguatan sistem akuntansi keuangan daerah serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan SPI dan SAP juga sangat penting agar laporan keuangan tidak hanya memenuhi standar formal, tetapi juga memiliki kualitas yang lebih baik dalam praktiknya.

Kata kunci: Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, SAP, SPI, Transparansi

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas dengan ribuan pulau serta keragaman budaya dan kondisi ekonomi yang berbeda antar daerah. Keberagaman ini mendorong pembentukan struktur pemerintahan yang berlapis, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Dalam kerangka tersebut, organisasi sektor publik berperan menjalankan pemerintahan untuk memenuhi pelayanan publik dengan orientasi nirlaba, sehingga kinerjanya diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi layanan (Anggriany & Hasnawati, 2023).

Di era tata kelola modern, organisasi sektor publik dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan ini dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun pemerintah daerah dan disetujui DPRD (Laoli et al., 2022). Pertanggungjawaban pengelolaan APBD dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang disusun setiap tahun dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Handayani et al., 2022).

LKPD wajib disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual untuk memastikan kualitas informasi keuangan yang andal dan sejalan dengan standar global. Laporan keuangan yang berkualitas harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami (PP No. 71 Tahun 2010). Kualitas ini penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik (Firmansyah et al., 2022). BPK, melalui audit tahunan, memberikan opini atas LKPD, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Sintia et al., 2022). Opini ini menjadi indikator penting tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Kabupaten Purbalingga, salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sejak 2021, menggantikan aplikasi lokal SIMRAL (Prameswari, 2022). Berdasarkan laporan BPK, Purbalingga berhasil meraih opini WTP lima tahun berturut-turut (2020–2024). Namun, audit tahun 2022 masih menemukan kelemahan, seperti ketidakpastian spesifikasi teknis pada proyek infrastruktur dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas, yang mengindikasikan perlunya penguatan sistem pengendalian internal (purbalinggakab.go.id).

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, Sistem Pengendalian Internal (SPI), yang berfungsi memastikan tujuan organisasi tercapai, proses berjalan efektif dan efisien, serta kepatuhan pada hukum (Machmudiyanti & Aufa, 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil berbeda: sebagian menemukan SPI berpengaruh

positif signifikan terhadap kualitas laporan (Dewi et al., 2020; Wibisono et al., 2023), sementara lainnya menemukan tidak berpengaruh (Gustina Ira, 2021).

Kedua, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), yaitu prosedur yang menghasilkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan (Nordawan, 2021). Sistem akuntansi yang baik membantu mempercepat, mempertepat, dan memperakurat penyajian laporan (Karmana et al., 2022). Beberapa penelitian mendukung pengaruh positif SAKD terhadap kualitas laporan (Priatna & Setiawan, 2023; Dewi et al., 2022), tetapi ada pula yang menunjukkan tidak berpengaruh (Defitri, 2023).

Ketiga, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagai pedoman baku pelaporan keuangan pemerintah, meningkatkan konsistensi dan keandalan laporan (Kuntadi & Syafira, 2023). Sebagian penelitian membuktikan SAP berpengaruh positif signifikan (Arfah, 2022; Simanjuntak et al., 2024), sedangkan penelitian lain menemukan tidak berpengaruh (Arza et al., 2021).

Keempat, Transparansi, yang memastikan keterbukaan informasi keuangan kepada publik sesuai peraturan, meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas (Rusdiana, 2022). Beberapa studi menunjukkan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan (Papra & Inapty, 2024), namun ada juga yang menemukan tidak berpengaruh (Nuroniyah et al., 2024).

Penelitian ini mengembangkan studi sebelumnya (Gustina, 2021) yang hanya menguji SPI dan SAKD, dengan menambahkan variabel SAP dan transparansi. Berdasarkan temuan beragam di penelitian terdahulu, penting untuk menguji kembali pengaruh SPI, SAKD, SAP, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan, khususnya di Kabupaten Purbalingga yang memiliki capaian WTP berturut-turut namun masih ditemukan kelemahan pengendalian internal.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Stewardship

Menurut Davis et al. (1997), teori stewardship menekankan bahwa manajer atau pengelola organisasi (steward) bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kepentingan pemilik atau pemangku kepentingan, bukan sekadar mengejar keuntungan pribadi. Teori ini berlandaskan asas kepercayaan dari pemberi wewenang, di mana manajemen bertindak sebagai good steward yang menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Setiap keputusan dan tindakan diarahkan untuk mengutamakan kepentingan organisasi dalam

mewujudkan visi dan misinya, sehingga orientasi steward berfokus pada tujuan kolektif, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

SPI (Sistem Pengendalian Internal)

Menurut IAPI (2011), Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan seluruh entitas terkait, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sejalan dengan itu, Kuntadi et al. (2022) mendefinisikan SPI sebagai proses menyeluruh yang melibatkan tindakan dan kegiatan berkelanjutan dari manajemen dan seluruh pegawai, dengan tujuan memberikan jaminan yang cukup terhadap pencapaian sasaran organisasi.

SPI memiliki indikator yang sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern diantaranya yaitu:

- a) Lingkungan pengendalian
- b) Penilaian risiko
- c) Aktivitas pengendalian
- d) Informasi dan komunikasi
- e) Pemantauan pengendalian intern

SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

Menurut Gustina (2021), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang mencakup proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau peristiwa keuangan, serta penyusunan laporan keuangan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi untuk menghasilkan laporan yang relevan, andal, dan tepat waktu, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, indikator SAKD tersebut terdiri dari:

- a) Perencanaan
- b) Penganggaran
- c) Pelaksanaan
- d) Penatausahaan
- e) Pelaporan

- f) Pertanggungjawaban

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)

Menurut Ramadhan dan Fahrani (2024), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip akuntansi yang ditetapkan untuk digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Lantu et al. (2023) menambahkan bahwa SAP adalah seperangkat persyaratan yang berlandaskan ketentuan hukum, dengan tujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah di Indonesia. Sementara itu, Komala dan Kusuma (2024) mendefinisikan SAP sebagai keseluruhan proses akuntansi yang dilakukan oleh setiap unit kerja pemerintahan untuk menghasilkan informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan ekonomi.

Adapun indikator SAP yaitu:

- a) Kesesuaian sistem dengan SAP
- b) Basis akrual
- c) Bukti disetiap transaksi
- d) Pencatatan kronologis
- e) Pengkalsifikasian transaksi
- f) Laporan keuangan setiap periode

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan dan kejelasan dalam penyampaian informasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, maupun organisasi lainnya. Prinsip ini memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting dapat diakses secara mudah oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga tercipta lingkungan yang akuntabel dan dapat dipercaya (Ritonga, 2024). Kromen et al. (2023) mendefinisikan transparansi sebagai pemberian informasi keuangan secara terbuka kepada publik mengenai pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada suatu entitas, sekaligus menunjukkan ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Pratiwi *et al.*, 2022) ada beberapa indikator transparansi yaitu:

- a) Keterbukaan informasi
- b) Kejelasan penyajian
- c) Konsistensi penyajian
- d) Kepatuhan terhadap standar

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merujuk pada sejauh mana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, memenuhi kebutuhan penggunanya dalam pengambilan keputusan, serta dapat dipercaya dan dibandingkan antarperiode. Permatasari (2021) menekankan bahwa kualitas laporan keuangan ditentukan oleh kemampuan informasi yang disajikan untuk dimengerti serta relevansinya bagi pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Kuntadi & Syafira (2023) menambahkan bahwa kualitas laporan keuangan mencerminkan standar informasi yang disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pembaca atau pengguna.

Indikator kualitas laporan keuangan yaitu:

- a) Relevan
- b) Andal
- c) Dapat dibandingkan
- d) Dapat dipahami

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat sistematis, terencana, dan terstruktur dengan mengutamakan penggunaan angka dalam pengumpulan, penafsiran, dan penyajian data (Syahroni, 2022). Lokasi penelitian adalah lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Purbalingga yang dipilih secara purposif, meliputi Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemilihan OPD tersebut didasarkan pada peran strategis dan keragamannya dalam fungsi pelayanan publik (Haryanto, 2019).

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai pada lima OPD tersebut, dengan sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria pegawai bidang keuangan dan memiliki masa kerja minimal dua tahun (Sugiyono, 2021). Data primer dikumpulkan melalui kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, artikel, dan dokumen resmi yang relevan (Sidik & Sunarsi, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Uji Validitas

Uji validitas konvergen (*Convergent Validity*) dilakukan untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur suatu konstruk (variabel laten) benar-benar saling berhubungan erat dan mengukur hal yang sama. Hasil *convergent* dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 *Convergent Validity (Outer Loading)*

| | KLK | SAKD | SAP | SPI | T |
|--------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| SPI.1 | | | | 0,831088 | |
| SPI.2 | | | | 0,813204 | |
| SPI.3 | | | | 0,758246 | |
| SPI.4 | | | | 0,811282 | |
| SPI.5 | | | | 0,898468 | |
| SAKD.1 | | 0,812195 | | | |
| SAKD.2 | | 0,837716 | | | |
| SAKD.3 | | 0,879771 | | | |
| SAKD.4 | | 0,885142 | | | |
| SAKD.5 | | 0,890032 | | | |
| SAKD.6 | | 0,847552 | | | |
| SAP.1 | | | 0,886825 | | |
| SAP.2 | | | 0,881229 | | |
| SAP.3 | | | 0,781088 | | |
| SAP.4 | | | 0,895478 | | |
| SAP.5 | | | 0,937893 | | |
| SAP.6 | | | 0,774015 | | |
| SAP.7 | | | 0,869564 | | |
| T.1 | | | | | 0,796956 |
| T.2 | | | | | 0,85879 |
| T.3 | | | | | 0,865408 |
| T.4 | | | | | 0,850832 |
| T.5 | | | | | 0,882682 |
| Y1 | 0,916667707 | | | | |
| Y2 | 0,942854841 | | | | |
| Y3 | 0,926244198 | | | | |
| Y4 | 0,919169244 | | | | |
| | | | | | |

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil *outer loading* pada tabel 1 diketahui seluruh nilai *outer loading* > 0,7 yang berarti seluruh indikator dapat diterima dipertahankan dalam proses analisis selanjutnya.

Hasil uji validitas diskriminan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 2. *Discriminant Validity (Cross-Loading)*

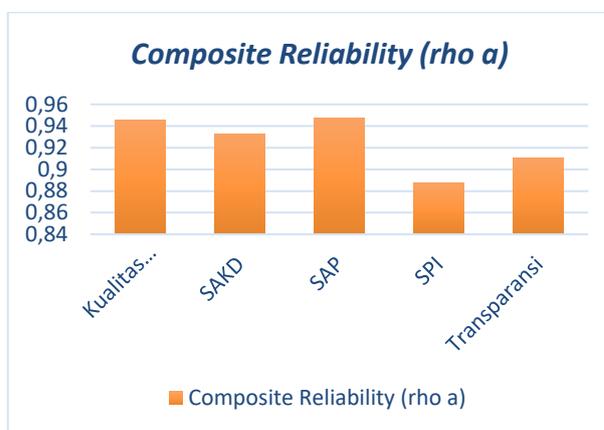
| | KLK | SAKD | SAP | SPI | Transparansi |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| SPI.1 | 0,5543 | 0,6928 | 0,6431 | 0,8311 | 0,5800 |
| SPI.2 | 0,4259 | 0,5845 | 0,4843 | 0,8132 | 0,4224 |
| SPI.3 | 0,4948 | 0,5589 | 0,5154 | 0,7582 | 0,4259 |
| SPI.4 | 0,5064 | 0,6432 | 0,6050 | 0,8113 | 0,4159 |
| SPI.5 | 0,5744 | 0,6915 | 0,6866 | 0,8985 | 0,5075 |
| SAKD.1 | 0,6401 | 0,8122 | 0,8112 | 0,7335 | 0,4995 |
| SAKD.2 | 0,6192 | 0,8377 | 0,7481 | 0,7113 | 0,4202 |
| SAKD.3 | 0,6515 | 0,8798 | 0,7994 | 0,7113 | 0,5002 |
| SAKD.4 | 0,6810 | 0,8851 | 0,6620 | 0,6257 | 0,5282 |
| SAKD.5 | 0,7821 | 0,8900 | 0,7661 | 0,6236 | 0,5836 |
| SAKD.6 | 0,6932 | 0,8476 | 0,7070 | 0,6063 | 0,5714 |
| SAP.1 | 0,6779 | 0,7557 | 0,8868 | 0,6032 | 0,5440 |
| SAP.2 | 0,7254 | 0,7665 | 0,8812 | 0,5843 | 0,6338 |
| SAP.3 | 0,5408 | 0,6632 | 0,7811 | 0,5186 | 0,3814 |
| SAP.4 | 0,5870 | 0,7623 | 0,8955 | 0,7177 | 0,4622 |
| SAP.5 | 0,6747 | 0,7568 | 0,9379 | 0,6375 | 0,5112 |
| SAP.6 | 0,5869 | 0,7121 | 0,7740 | 0,6169 | 0,4626 |
| SAP.7 | 0,6845 | 0,8246 | 0,8696 | 0,6723 | 0,5144 |
| T.1 | 0,6514 | 0,5003 | 0,4792 | 0,5056 | 0,7970 |
| T.2 | 0,5808 | 0,5063 | 0,5318 | 0,4592 | 0,8588 |
| T.3 | 0,6474 | 0,4686 | 0,4953 | 0,4920 | 0,8654 |
| T.4 | 0,5320 | 0,4938 | 0,4496 | 0,4417 | 0,8508 |
| T.5 | 0,7111 | 0,5958 | 0,5363 | 0,5357 | 0,8827 |
| Y1 | 0,9167 | 0,6934 | 0,6730 | 0,6663 | 0,7066 |
| Y2 | 0,9429 | 0,7626 | 0,6906 | 0,5780 | 0,6772 |
| Y3 | 0,9262 | 0,7339 | 0,7342 | 0,5282 | 0,6785 |
| Y4 | 0,9192 | 0,7461 | 0,6687 | 0,5500 | 0,6836 |
| | | | | | |

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa data lolos dari uji penelitian, dikarenakan nilai loading setiap indikator pada variabel latennya sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan nilai loading indikator tersebut pada variabel laten lainnya dan korelasi indikator mempunyai nilai diatas 0,5

b) Uji Reabilitas

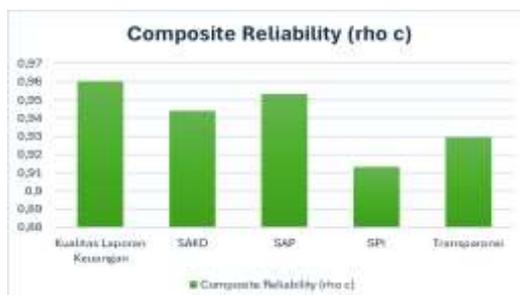
Dalam penelitian ini, terdapat dua uji reliabilitas yang dilakukan yaitu *composite reliability rho_a* dan yaitu *composite reliability rho_c*. Hasil pengujian *composite reliability rho_a* dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1 *Composite Reliability rho_a*

Dari gambar 1 hasil uji dari semua variabel $> 0,7$ yang artinya konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan pengujian setelahnya dapat dilanjutkan.

Composite reliability rho_c digunakan untuk menilai seberapa besar *varians* yang dijelaskan oleh konstruk laten dibandingkan dengan total *varians* yang teramati, termasuk *varians* kesalahan.



Gambar 2 *Composite Reliability rho_c*

Berdasarkan hasil *composite reliability* pada gambar 2, diketahui seluruh *nilai composite reliability rho_c* $> 0,7$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

c) R-square

Koefisien determinasi (*R-Square*) digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3. R-square

| | <i>R-square</i> | <i>R-square adjusted</i> |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| Kualitas Laporan Keuangan | 0,74389 | 0,7256 |

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 3 Nilai *r-square* variabel kualitas laporan keuangan 0,743. Hal ini berarti variabel laten SPI, SAKD, SAP, dan Transparansi mampu menerangkan atau memprediksi 74,3% kualitas laporan keuangan sedangkan 25,7% sisanya dapat diterangkan oleh variabel lain.

d) *F-square*

F-square dilakukan untuk menguji kemampuan secara simultan variabel independen yaitu SPI, SAKD, SAP dan transparansi terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan. Hasil dari uji F pada penelitian ini disajikan dalam tabel 4

Tabel 4 F-Square

| | <i>f-square</i> |
|---|-----------------|
| SAKD -> Kualitas Laporan Keuangan | 0,180212 |
| SAP -> Kualitas Laporan Keuangan | 0,020519 |
| SPI -> Kualitas Laporan Keuangan | 0,014071 |
| Transparansi -> Kualitas Laporan Keuangan | 0,397766 |

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa Variabel SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai *f-square* 0,014 yang berarti bahwa nilai ini berada dibawah 0,02. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel SPI memiliki efek yang kecil terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel SAKD memiliki nilai *f square* 0,180 sehingga menunjukkan bahwa variabel SAKD memiliki efek yang sedang terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel SAP memiliki nilai *f-square* 0,02 sehingga variabel SAP memiliki efek yang kecil terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel transparansi memiliki nilai *f-square* 0,397 sehingga variabel transparansi memiliki efek yang besar terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

e) *T - Statistic*

T – Statistic atau uji t dilakukan untuk menguji kemampuan secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari uji t pada penelitian ini disajikan dalam tabel 5

Tabel 5 *t- statistic*

| | <i>Original sample (O)</i> | <i>Sample mean (M)</i> | <i>Standard deviation (STDEV)</i> | <i>T statistics (O/STD EV)</i> | <i>P values</i> |
|---|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| SAKD -> Kualitas Laporan Keuangan | 0,488 | 0,485 | 0,173 | 2,823 | 0,005 |
| SAP -> Kualitas Laporan Keuangan | 0,150 | 0,174 | 0,174 | 0,859 | 0,390 |
| SPI -> Kualitas Laporan Keuangan | -0,098 | -0,098 | 0,111 | 0,879 | 0,379 |
| Transparansi -> Kualitas Laporan Keuangan | 0,414 | 0,397 | 0,134 | 3,083 | 0,002 |

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat nilai variabel SPI terhadap variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai T statistik < T tabel yaitu $0,879 < 1,671$ dengan P-values < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SPI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Variabel SAKD memiliki nilai T statistik yang lebih besar dari T tabel yaitu $2,823 > 1,671$ dengan P-values < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SAKD memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Variabel SAP memiliki nilai T statistic yang lebih kecil dari T tabel yaitu $0,859 < 1,671$ dengan P-values > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SAP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

Variabel transparansi memiliki nilai statistic yang lebih besar sdari T tabel yaitu $3,083 > 1,671$ dengan P-values $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

a. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan SPI di OPD Kabupaten Purbalingga belum mampu memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, khususnya dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan atau penyimpangan pada proses penyusunan laporan.

Dalam perspektif *Stewardship Theory*, hasil ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan lebih mungkin dipengaruhi oleh faktor non-struktural seperti integritas, komitmen, dan motivasi intrinsik pengelola, dibandingkan dengan mekanisme kontrol formal semata. Walaupun SPI penting untuk menjamin kepatuhan prosedural, keberadaannya tidak secara otomatis menjadi determinan utama peningkatan kualitas laporan keuangan ketika integritas dan dedikasi pegawai sudah tinggi.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Gustina (2021) dan Mahartini et al. (2021) yang juga menemukan bahwa SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Konsistensi temuan ini di berbagai konteks memperkuat argumentasi bahwa perbaikan SPI belum tentu berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan, sehingga diperlukan identifikasi faktor lain yang lebih dominan.

b. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengujian statistik membuktikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa SAKD berperan besar dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan SAKD yang efektif memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, dan penyajian data

keuangan berjalan sistematis sehingga menghasilkan informasi yang akuntabel.

Keterkaitan temuan ini dengan *Stewardship Theory* terletak pada peran pemerintah sebagai pengelola publik yang berkewajiban menyajikan laporan keuangan secara bertanggung jawab. SAKD berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi keuangan yang disajikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Ramadhan & Fahrani (2024) serta Permadi et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa penerapan SAKD berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik kualitas SAKD yang digunakan, semakin tinggi pula tingkat keandalan dan relevansi laporan keuangan yang dihasilkan.

c. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Analisis statistik menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun SAP telah diterapkan di OPD Kabupaten Purbalingga, implementasinya belum optimal untuk mendukung terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam kerangka *Stewardship Theory*, hasil ini memperlihatkan bahwa standar formal seperti SAP tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Faktor latar belakang pendidikan dan pemahaman akuntansi menjadi kunci keberhasilan penerapan SAP secara efektif.

Temuan ini selaras dengan penelitian Arza et al. (2021) dan Mahartini et al. (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan SAP tidak secara langsung mempengaruhi kualitas laporan keuangan, terutama pada organisasi dengan keterbatasan kompetensi teknis aparatur.

d. Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian membuktikan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi keuangan dan kemudahan akses publik terhadap data keuangan berkontribusi besar pada terciptanya laporan yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi.

Sejalan dengan *Stewardship Theory*, transparansi mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyusun laporan keuangan dengan integritas dan tanggung jawab penuh. Tingkat keterbukaan yang tinggi memungkinkan pengawasan publik berjalan efektif dan memperkuat akuntabilitas.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Zubaidah & Nugraeni (2023) serta Papra & Inapty (2024) yang mengonfirmasi pengaruh positif transparansi terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi transparansi, semakin besar pula peluang terciptanya laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Purbalingga.

- a. Sistem Pengendalian Internal terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan SPI saja belum cukup untuk menjamin tercapainya laporan keuangan yang berkualitas, terutama jika tidak diiringi dengan faktor non-teknis seperti integritas dan komitmen aparatur.
- b. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan SAKD yang baik mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai ketentuan, sehingga memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- c. Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan SAP belum optimal, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola laporan keuangan.
- d. Transparansi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Keterbukaan informasi keuangan yang baik memungkinkan pengawasan publik berjalan efektif, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan terhadap laporan keuangan yang disajikan.

DAFTAR REFERENSI

- Aldi Sujadin Papra, & Biana Adha Inapty. (2024). Pengaruh Siskeudes, kompetensi SDM dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pengendalian internal sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi*.
- Arfah. (2022). Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Camat Sei Tuan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi*. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v1i1.130>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Defiana Ramadhani, & Halmawati. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan: Studi pada OPD Kabupaten Simalungun. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.16>
- Dewi, et al. (2022). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Kharisma*.
- Handayani, T., et al. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.32639/jiak.v11i1.14>
- Hardika Wibisono, et al. (2023). Pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Pemerintahan Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*.
- Haryanto. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*.
- Ira Gustina. (2021). Pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. <https://doi.org/10.32520/jak.v10i1.1658>
- Karmana, et al. (2022). Pengaruh penerapan SIMDA keuangan terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung). *Accounting and Management Journal*. <https://doi.org/10.55208/aj.v2i2.38>
- Komala, R., & Kusuma, H. (2024). Analysis of the application of fixed assets based on government accounting standards (PSAP) No. 07.
- Kromen, et al. (2023). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah (suatu kajian studi literatur manajemen keuangan daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*.
- Kuntadi, & Syafira. (2023). Pengaruh standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Economina*.
- Kuntadi, et al. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan kecurangan: sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, kesesuaian kompensasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. <https://doi.org/10.59188/jcs.v1i4.97>
- Lantu, et al. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi Manado*. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4255>

- Laoli, et al. (2022). Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Nias (studi kasus BPKPD sebagai leading sector penganggaran). *Accounting and Management Journal*.
- Mahartini, et al. (2021). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. *Jurnal Karma*. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.90>
- Oktriana Arza, et al. (2021). The effect of human resources, application of government accounting standards and accounting information systems on the quality of financial reports in the government of the City of Padang Panjang. *Jurnal Pareso*.
- Permatasari, et al. (2021). Pengaruh kompetensi SDM dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dialogue*.
- Prameswari. (2022). Pengaruh penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap perolehan opini audit BPK tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Pratiwi, et al. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*.
- Rahayu, & Dewi. (2022). Pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ritonga. (2024). Transparansi dan akuntabilitas: Peran audit dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.35906/equili.v13i2.2004>
- Rusdiana. (2022). Akuntabilitas kinerja dan pelaporan penelitian. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD.
- Sintia, et al. (2022). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten OKI. *JAF: Journal of Accounting and Finance*. <https://doi.org/10.25124/jaf.v6i2.5198>
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syahroni, M. (2022). Prosedur penelitian kuantitatif. Jakarta: [Penerbit].
- Tegor, et al. (2021). Penerapan standar akuntansi dan kualitas aparatur terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Cafetaria*. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v2i1.276>
- Zubaidah, & Nugraeni. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3475>